

Pengelolaan Dana Desa di Lembang Parandangan, Buntu Pepasan, Toraja Utara

Bergita Gusti Lipu
bergitagustilipu@gmail.com

Lutfi Muta'ali
luthfimutaali@ugm.ac.id

Abstract

The government realizes its commitment to bring economic equality and development, especially for villages in Law No. 6 of 2014 by allocating village funds, one of which is Lembang Parandangan. The management of village funds are important to discuss because, in practice, there are not a few problems of irregularities in village funds by the village head or his officials. This study aims to identify the use of village funds and develop the concept of management of village funds during 2015-2019 in Lembang Parandangan.. This research is inductive qualitative research with purposive sampling and accidental sampling techniques. Data collection methods are in-depth interviews, non-participatory field observations, documentation, and literature study. The results showed that the priority for the use of village funds in 2015-2019 was for physical development programs, especially road infrastructure. Six concepts have been developed that are related to the use and management of village funds and the concept of the continuation and management of lembang funds is an important concept behind the other three concepts. The results of implementing the development program have outcomes that are felt by the lembang community, namely additional income, helping meet daily needs, increasing access to creating new jobs.

Keywords : Village fund, management, concept, outcome

Abstrak

Pemerintah mewujudkan komitmennya untuk menghadirkan pemerataan ekonomi dan pembangunan, utamanya bagi desa dalam UU No.6 Tahun 2014 dengan cara mengalokasikan dana desa, salah satunya Lembang Parandangan. Pengelolaan dana desa merupakan hal yang penting untuk dibahas sebab dalam praktiknya, tidak sedikit permasalahan penyimpangan dana desa oleh kepala desa maupun aparatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan dana desa dan menyusun konsep pengelolaan dana desa selama 2015-2019 di Lembang Parandangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif induktif dengan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Metode pengumpulan data yaitu *in-depth interview*, observasi lapangan bersifat non-partisipasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2015-2019 yaitu untuk program pembangunan fisik terutama infrastruktur jalan. Terdapat enam konsep yang berhasil disusun terkait dengan pengelolaan dana desa dan konsep keberlangsungan pelaksanaan dan pengelolaan dana lembang menjadi konsep penting yang melatarbelakangi ketiga konsep lainnya. Hasil dari pelaksanaan program pembangunan memiliki *outcome* yang dirasakan oleh masyarakat lembang, yaitu tambahan pendapatan, membantu memenuhi kebutuhan harian, peningkatan akses hingga terciptanya lapangan pekerjaan baru.

Kata kunci : Dana desa, pengelolaan, konsep, *outcome*

PENDAHULUAN

Pada masa Orde Baru dan diawal masa Orde Reformasi, terdapat perdebatan pemikiran dalam pendekatan pembangunan pedesaan di Indonesia oleh tiga kelompok. Salah satu pemikiran diantaranya menempatkan pedesaan dan masyarakat didalamnya sebagai objek dalam pembangunan (Muslihah et al., 2019). Setelahnya, pemerintah kemudian menyeragamkan pembangunan di seluruh desa di Indonesia. Namun dalam praktiknya, terjadi berbagai kekeliruan penerapan program sehingga Indonesia dapat dikatakan kehilangan momentum kebangkitan pedesaan (Jamal, 2017).

Seiring berjalannya waktu, pembangunan desa selalu mengalami tantangan dari masa ke masa. Pembangunan desa masa kini dihadapkan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka sementara desa belum beranjak dari profil lamanya yakni terbelakang dan miskin (Basah, 2009). Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia (Hernowo, 2004).

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan butir ketiga dari nawacita pemerintahan Jokowi-JK. UU RI No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi dasar hukum pemerintah dalam mewujudkan komitmennya untuk menghadirkan pemerataan pembangunan dan ekonomi yang berkeadilan. Melalui UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, seluruh desa di Indonesia diposisikan sebagai ujung tombak

pembangunan dengan diberikan sokongan berupa dana dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat dipergunakan sebaik-baiknya bagi peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakatnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah RI 47/2015 tentang Perubahan Atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa adalah dana yang diberikan kepada seluruh desa di Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap Kab./Kota. Program ini menjadi program pertama sepanjang sejarah Indonesia, juga pertama dan terbesar di dunia dalam usaha pemerintah mendukung pembangunan di desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Pengelolaan dana desa juga merupakan hal yang penting untuk dibahas dalam konteks dana desa. Berkaitan dengan hal ini, tidak sedikit permasalahan penyimpangan dana desa yang merebak dan dilakukan oleh kepala desa maupun aparat desa yang memang secara langsung mengelola dana tersebut (Cahyono et al., 2020).

Pada tahun 2019, menurut data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, jumlah desa yang menerima dana desa sebanyak 74.953 desa, salah satunya adalah Lembang Parandangan, Kec. Buntu Pepasan, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, ketua Toraja Transparansi sekaligus presidium Aliansi Masyarakat Toraja Anti

Korupsi (AMTAK) Drs. Tommy Tiranda, menegaskan agar pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja. Hal ini sebab adanya investigasi dari seorang awak media sebagai tindak lanjut curhatan masyarakat salah satu kecamatan di Toraja Utara, mengenai pekerjaan fisik fiktif yang dilaporkan sebagai dana desa ke inspektorat tetapi menurut masyarakat pekerjaan tersebut didanai oleh dana aspirasi dewan (86news, 2019). Dana desa merupakan sebuah potensi bagi lembang-lembang di Toraja Utara, salah satunya yaitu Lembang Parandangan sehingga harus digunakan dan dikelola secara optimal oleh pemerintah desa dengan didukung fungsi pengawasan penuh oleh

masyarakat di desa. Berdasarkan dokumen Indeks Pembangunan Desa tahun 2018, Lembang Parandangan merupakan desa dengan nilai IPD tertinggi di Kecamatan Buntu Pepasan yaitu sebesar 67,81 sehingga Lembang Parandangan tergolong dalam status desa berkembang. Nilai dari IPD ini, dapat juga digunakan sebagai alat dalam meninjau keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa selama pengalokasian dana desa. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan dana desa, menganalisis *outcome* dari hasil penggunaan dana desa serta menyusun konsep pengelolaan dana desa selama 2015-2019 di Lembang Parandangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat induktif yaitu pendekatan dengan mengambil kesimpulan secara umum dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Induktif sendiri adalah cara berpikir dalam penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang sifatnya individual. Penarikan kesimpulan ini diawali dengan menggabungkan pernyataan-pernyataan secara individual dan yang bersifat umum. Pendekatan induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda yang terdapat dalam data serta lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan (Moeleong, 2004:5).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat Lembang Parandangan yang ditentukan melalui penentuan sampel

dengan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. *Purposive sampling* berdasarkan pada kelompok yang direpresentasikan yaitu perangkat desa dan tokoh masyarakat sedangkan *accidental sampling* yaitu masyarakat umum yang ditemui secara random saat di lapangan. Selanjutnya, para narasumber dalam penelitian ini yang disebut sebagai informan yaitu kepala lembang, bendahara lembang, ketua Badan Permusyawaratan Lembang (BPL), wakil ketua Badan Permusyawaratan Lembang (BPL), sekretaris Badan Permusyawaratan Lembang (BPL), tokoh masyarakat dan tim pelaksana kegiatan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa cara yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan, observasi lapangan bersifat non-partisipasin, dokumentasi, dan studi pustaka. Tahapan analisis data dalam penelitian ini yaitu melalui analisis data

kualitatif dengan proses meliputi reduksi data, kategorisasi, sintesis, dan menjawab pertanyaan penelitian.. Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis data kualitatif secara induktif dengan metode kategorisasi yang menyarikan temuan lapangan ke dalam unit-unit informasi dan mensistesiskannya ke dalam tema, dan selanjutnya berakhir dengan menginduksi tema ke dalam rumusan konsep yang berhubungan dengan konteks penelitian. Pengujian atau pemeriksaan terhadap derajat kepercayaan data (keabsahan data) yaitu melalui teknik triangulasi data yaitu dengan cara penyelarasan data antara hasil *in-depth interview* terhadap informan, observasi lapangan dengan masyarakat umum serta dokumentasi lapangan (Karidewi, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Pemanfaatan Dana Lembang di Lembang Parandangan Tahun 2015-2019

Berkaitan dengan implementasinya di lapangan, pemerintah pusat setiap tahun mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT) yang menjadi pedoman bagi pemerintah lembang dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan didanai dengan dana lembang. Dana lembang pertama kali di terima oleh Lembang Parandangan yaitu pada tahun 2015 dan pada tahun selanjutnya, dana yang diterima selalu meningkat.

Selama lima tahun pertama dari awal pengalokasiannya di tahun 2015-2019, dana lembang yang diterima Lembang Parandangan hampir sebagian besar prioritaskan bagi program pembangunan. Kondisi infrastruktur

yang belum memadai serta infrastruktur sebagai tolak ukur perekonomian lembang menjadi alasan utama pemerintah lembang memprioritaskan pembangunan fisik. Minimnya akses masyarakat karena kondisi jalan memperkuat pengalokasian dana lembang untuk pembangunan rabat beton, penataan jalan maupun pentaludan jembatan. Berikut merupakan pendapatan Lembang Parandangan tahun 2015-2019 yang bersumber dari APBN dan APBD, yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. Grafik Pendapatan Lembang Parandangan bersumber dari APBN & APBD Tahun 2015-2019

Diawal pengalokasian dana lembang, tepatnya pada tahun 2015, Lembang Parandangan mendapatkan dana dibawah Rp410.349.415 dan dialokasikan oleh pemerintah lembang untuk rabat beton jalan di beberapa titik. Pertama, rabat beton jalan dari Timbang ke Pang'rapa dengan total nilai proyek sebesar Rp74.400.146. Kedua, rabat beton jalan dari To' Barana ke Pangra'pa To' Nangka' dengan total nilai proyek sebesar Rp183.797.286.

Pada tahun kedua penerimaan dana lembang yaitu tahun 2016, Lembang Parandangan mendapatkan dana lembang dibawah Rp758.888.574 yang digunakan untuk rabat beton jalan dari Tondok Ba'ru ke SMKN 1 Buntu Pepasan dengan total anggaran begitu besar yaitu Rp583.888.574 dan dengan panjang 700 m.

Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018, Lembang Parandangan sudah mendapat dana lembang berkisar kurang lebih dibawah nominal satu milyar yang kemudian tetap dialokasikan untuk rabat beton jalan dari SMKN 1 Buntu Pepasan ke Porriko' dengan total nilai proyek sebesar Rp625.867.071 dengan panjang jalan yang dibangun sepanjang 855 meter. Lalu rabat beton jalan dari Pangra'pa ke To' Nangka senilai Rp150.000.000.



Gambar 2. Rabat Beton Jalan Pangra'pa ke To' Nangka'
(Foto : Lipu, 2020)

Lanjutan rabat beton jalan dari SMK 1 Buntu Pepasan ke Porriko' dengan volume $2,75 \text{ cm} \times 15 \text{ cm} \times 290 \text{ m}$ dan nilai proyek yaitu Rp287.621.000 dan lanjutan rabat beton jalan dari Pa'lak ke To'yasa dengan volume $2,75 \text{ cm} \times 15 \text{ cm} \times 330 \text{ m}$ dengan nilai proyek sebesar Rp330.000.000. Selain itu, terdapat

pula pembangunan rabat beton yang baru yaitu, jalan dari Kantor Lembang Parandangan ke SMP 2 Buntu Pepasan dengan nilai proyek sebesar Rp104.277.000 dan volumenya yaitu $2,75 \text{ cm} \times 15 \text{ cm} \times 100 \text{ m}$. Pemugaran TK Banne La'bi' juga dilakukan pada tahun ini. Pemugaran yang dimaksud yaitu pemasangan pagar disekeliling bangunan TK serta pengecatan bangunan dan pagar dengan total anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp115.868.000.



Gambar 3. Pemugaran TK Banne La'bi'
(Foto : Lipu, 2020)

Jumlah dana lembang tahun 2019 diterima Lembang Parandangan sudah menembua nominal satu milyar lebih. Pengalokasiannya pun tetap untuk pembangunan fisik jalan. Penataan jalan dari Dusun Tondok Ba'ru dengan alokasi anggaran sebesar Rp347.260 dan volumenya yaitu $2,75 \text{ cm} \times 15 \text{ cm} \times 306 \text{ m}$. Pelaksanaan rabat beton tetap dilaksanakan di titik yang berbeda dari tahun sebelumnya yaitu dari To' Uma ke Taude dengan volume $2,75 \text{ cm} \times 15 \text{ cm} \times 200 \text{ m}$ dan total anggarannya yaitu Rp250.145.000 serta rabat beton dari Pangra'pa ke To' Barana dengan volume $2,75 \text{ cm} \times 15 \text{ cm} \times 244 \text{ m}$ dan total anggarannya sebesar Rp224.565.000.

Memasuki tahun anggaran baru tepatnya 2019, pemerintah lembang mencoba mengalokasikan dana sebesar Rp50 juta untuk pembentukan BUMDes. Pembentukan BUMDes ini telah disepakati bersama antara pemerintah lembang dengan masyarakat dan dinyatakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) Parandangan 2019. Akan tetapi, setelahnya turun instruksi dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk memasukkan anggaran *e-voting* dalam APBL ditahun tersebut. Atas persetujuan masyarakat dan usulan pemerintah kabupaten, maka anggaran dialihkan untuk pembelian alat *e-voting* pilkades meskipun secara aturan, dana lembang tidak boleh diperuntukkan untuk hal-hal semacam itu. Tabel berikut menunjukkan pengalokasian dana lembang bagi program pembangunan sejak tahun 2015-2019.

Tabel 1. Pendapatan Lembang dan Profil Penggunaan Dana Lembang di Lembang Parandangan Tahun 2015-2019

No.	Nilai Proyek	Nama Program
2015 (Rp410.349.415)		
1.	Rp74.400.146	Rabat Beton dari Timbang ke Pangra'pa
2.	Rp183.797.286	Rabat Beton dari To'Barana ke Pangra'pa To'angka'
2016 (Rp758.888.574)		
1.	Rp583.888.574	Rabat Beton Jalan dari Tondok Baru ke SMK 1 Buntu Pepasan
2017 (Rp1.016.111.565)		
1.	Rp625.867.071	Rabat Beton Jalan dari SMK 1 Buntu Pepasan ke Porriko'
2.	Rp150.000.000	Rabat Beton dari Pangra'pa ke To'angka'
2018 (Rp1.045.586.000)		
1.	Rp104.277.000	Rabat Beton Jalan dari Kantor Lembang ke SMP 2 Buntu Pepasan
2.	Rp107.820.000	Lanjutan Rabat Beton Pangra'pa ke To'angka'
3.	Rp287.621.000	Lanjutan Rabat Beton Jalan dari SMK 1 Buntu Pepasan ke Porriko
4.	Rp330.000.000	Lanjutan Rabat Beton Jalan Pa'lak ke To'yasa
5.	Rp115.868.000	Pemagaran TK Banne La'bi'
6.	Rp20.000.000	Pentaludan Jembatan di Jalan ke SMK 1 Buntu Pepasan
2019 (Rp1.164.144.000)		
1.	Rp347.260.000	Penataan Jalan dari Dusun Tondok Ba'ru
2.	Rp250.145.000	Rabat Beton Jalan dari To'uma ke Taude
3.	Rp224.565.000	Rabat Beton dari Pangra'pa ke To'barana'

Saat observasi lapangan, sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa sebelum ada jalan dan atau sebelum kondisi jalan lebih baik, mereka hanya bisa berjalan kaki dengan memikul beban bawaan mereka dan hal tersebut dapat menghabiskan waktu yang cukup lama. Terlebih ketika, terdapat kebutuhan masyarakat yang mendesak dan tidak tersedia di lembang maka masyarakat harus berjalan kaki keluar dari area lembang untuk menjangkau angkutan umum yang dapat membawa mereka turun ke pusat kota.

Keadaan ini diakibatkan karena kendaraan roda dua dan roda empat tidak dapat menjangkau permukiman penduduk yang memiliki pola mengelompok karena kondisi jalan yang buruk. Kondisi ini diperburuk dengan kondisi topografi lembang yang berbukit-bukit serta jenis tanahnya yaitu tanah lempung sehingga sangat sulit dilalui bahkan dengan berjalan kaki, terlebih saat musim penghujan tiba. Oleh karenanya, sebagian besar masyarakat merasa begitu terbantu setelah dana lembang masuk dan perbaikan jalan dilakukan diberbagai titik di lembang selama periode 2015-2019.

2. Konsep Pengelolaan Dana Lembang Di Lembang Parandangan Tahun 2015-2019

Konseptualisasi merupakan suatu tahapan dalam mencari keterhubungan antar tema dalam suatu penelitian. Akan ada tema-tema yang didapatkan dari hasil reduksi data yang kemudian dikategorisasi kedalam unit-unit informasi, disintesis menjadi tema-tema yang didapatkan dari hasil *indepth interview* dengan beberapa informan, observasi lapangan, dokumentasi, data sekunder serta studi pustaka. Sintesis data sendiri

merupakan paduan dari beberapa data hasil lapangan sehingga membentuk suatu keselarasan.

Adapun tema-tema yang dihasilkan dari kategorisasi unit informasi yaitu berjumlah sepuluh, antara lain ketentuan dan objek pendanaan, proses perencanaan pembangunan, pendapatan lembang, peranan pemerintah dan lembaga kemasyarakatan lembang, pengelolaan dan pelaksanaan program, keterlibatan masyarakat lembang, pencapaian pembangunan lembang, kepuasan terhadap pembangunan, kendala pembangunan lembang, dan kendala pembangunan lembang. Tema-tema yang berhasil disintesis akan diabstraksi kedalam beberapa konsep. Abstraksi tema menjadi konsep sendiri merupakan upaya dalam merangkum tema-tema yang ada kepada intinya. Oleh karenanya, suatu konsep bisa terbentuk dari beberapa tema yang saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya dengan konsep tersebut. Begitu pula dengan tema, yang mana bisa mengarah pada satu konsep bahkan ke semua konsep yang ada (Saraswati, 2019).

Berdasarkan hasil konseptualisasi terhadap tema-tema dalam penelitian ini, disusun enam konsep utama, yaitu :

1. **Konsep Partisipasi Masyarakat** yang diabstraksi dari tema “pengelolaan dan pelaksanaan program” dan tema “keterlibatan masyarakat lembang”. Konsep ini muncul karena tingkat partisipasi masyarakat lembang meningkat signifikan dalam pembangunan. Program-program yang didanai dana lembang yang bersifat swakelola merupakan langkah yang tepat dalam melibatkan peran aktif

masyarakat. Keterlibatan masyarakat sudah tidak dibatasi lagi oleh gender namun semuanya ikut terlibat, entah laki-laki dan perempuan, tua maupun muda bahkan anak-anak sekalipun turut serta.

2. **Konsep Kebaruan Kondisi Lebang**, yaitu konsep yang muncul dari abstraksi beberapa tema yaitu “pendapatan lembang”, “peranan pemerintah dan lembaga kemasyarakatan lembang”, “kondisi pembangunan lembang” serta “kondisi terhadap pembangunan”.

Konsep ini muncul karena adanya perbedaan wajah lembang dahulu dan sekarang. Dahulu, pembangunan di Lebang Parandangan adalah stagnan berdasarkan hasil indepth interview dengan beberapa informan. Keadaan ini disebabkan karena kondisi lembang pada saat itu begitu memprihatikan ditambah tidak adanya sumber pendapatan yang dapat membiayai pelaksanaan pembangunan. Pembangunan infrastruktur seperti rabat beton jalan, pentaludan jembatan, pemugaran TK hingga hingga penataan jalan merupakan deretan program-program yang direalisasikan dari dana lembang. Kondisi pembangunan di lembang ini begitu membantu masyarakat, dari menyerap tenaga kerja hingga mempermudah akses masyarakat. Jalan yang sudah dirabat beton diberbagai sudut lembang membuka akses untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Kendaraan-kendaraan tersebut sudah bisa sampai ke halaman rumah masyarakat. Secara keseluruhan, masyarakat begitu senang dan mengakui keberhasilan dari program-program yang telah terlaksana dari dana lembang.

3. **Konsep Kapasitas Aparatur dan Sarana Kerja Terbatas**

, merupakan konsep hasil abstraksi dari tema “peranan pemerintah dan lembaga kemasyarakatan lembang”. Konsep ini muncul ketika dijumpai hal-hal menarik terkait sarana kerja terbatas dan kapasitas aparatur lembaga kemasyarakatan lembang dan masyarakat lembang dalam pengawasan akan pengelolaan dana lembang oleh pemerintah lembang khususnya kepala lembang. Hal yang menarik pertama adanya ketidaksesuaian antara tugas pokok perangkat lembang dalam pengelolaan dana lembang yaitu perangkat lembang yang ada, tidak difungsikan sebagaimana fungsi semestinya yaitu bendahara dan sekretaris lembang.

Keterbatasan dalam konteks ketidaktahuan akan penggunaan komputer dalam menjalankan tugas menjadi alasan mengapa tugas dan fungsi bendahara lembang tidak sesuai dengan yang semestinya. Disamping itu, keterbatasan pendidikan menjadi salah lain pengalihan tugas dan fungsi bendahara lembang. Ketidaksesuaian antara tugas sekretaris lembang dengan yang semestinya bukan karena keterbatasan dalam faktor pendidikan melainkan karena keadaan sehingga yang dapat dilakukan hanya menjalankan tugas yang diperintahkan. Hal ini karena perangkat-perangkat lembang ini dapat bekerja karena diangkat dan dipilih langsung oleh kepala lembang. Hal inilah yang kemudian menjadi salah faktor ketidakberdayaan posisi perangkat lembang.

Selain itu, keterbatasan terhadap pengawasan pengelolaan dana lembang sangat dirasakan oleh Badan Permusyawaratan Lembang. Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) merupakan lembaga kemasyarakatan lembang yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dan sekaligus menjadi mitra kerja kepala lembang selama periode pemerintahannya. BPL atau BPD, layaknya lembaga legislatif di tingkat lembang dan BPL sendiri tidak dapat diganti oleh kepala lembang, namun sebaliknya BPL dapat mengajukan penggantian kepala lembang. Badan Permusyawaratan Lembang sendiri sebagai mitra kerja kepala lembang menyatakan tidak bekerja secara baik selama periode kepala lembang yang lalu karena, payung hukum yang kuat dalam meminta pertanggungjawaban penyerapan dana lembang kepada kepala lembang

4. **Konsep Keberlangsungan Pengelolaan Dana Lembang**

merupakan konsep yang muncul dari abstraksi tema “ketentuan dan objek pendanaan”, “proses perencanaan pembangunan”, “peranan pemerintah dan lembaga kemasyarakatan lembang”, “pengelolaan dan pelaksanaan program” serta tema “kendala pembangunan lembang”. Konsep ini muncul atas keterkaitan diantara beberapa tema yang telah diabstraksi. Penggunaan serta pengelolaan dana lembang di Lembang Parandangan secara umum memang telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, di lain sisi juga masih terdapat beberapa ketidaksesuaian pengelolaan dana lembang dengan ketentuan yang berlaku,

sehingga hal ini menjadi catatan bagi pemerintah lembang sebagai pihak yang memiliki andil besar dalam pembangunan lembang.

Dalam pelaksanaan serta pengelolaan dana lembang, sudah seharusnya pemerintah lembang menerapkan prinsip-prinsip dalam tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta dengan berasas pada pengelolaan keuangan lembang dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Prinsip-prinsip *good governance* memiliki kesamaan dengan asas-asas pengelolaan keuangan lembang yakni pemerintah harus akuntabel, transparan, partisipatif, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, salah satunya dalam pengelolaan dana desa.

Menurut penuturan salah satu informan, selama ini kepala lembang sebagai pengguna anggaran lembang tidak disiplin dan tidak transparan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana lembang terutama kepada BPL.

Berdasarkan hasil observasi lapangan pula, peneliti menemukan ketidaksinkronan pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah lembang dengan yang disampaikan oleh masyarakat lembang berkaitan dengan pelaksanaan program yang didanai oleh dana lembang. Keadaan yang dimaksud ini yaitu para pekerja yang dipekerjakan dalam program yang didanai oleh dana lembang merupakan orang-orang yang berada di pihak kepala lembang sehingga masyarakat diluar itu tidak tahu dan tidak terlibat. Kondisi ini disampaikan oleh beberapa masyarakat saat observasi lapangan, namun berbeda dengan yang

disampaikan oleh beberapa informan yang mana tidak ada pilih-pilih pekerja dalam kegiatan ini.

5. Konsep Capaian Program

Pembangunan, yaitu konsep yang muncul karena adanya kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat dari *outcome* program yang telah terelasisasi melalui pendanaan dana desa dari tahun 2015-2019 di Lembang Parandangan. Konsep ini diabstraksi dari tiga tema yaitu tema kemanfaatan hasil, tema pencapaian pembangunan lembang dan tema kepuasan terhadap pembangunan. Pelaksanaan program yang didanai oleh dana lembang selama lima tahun terakhir sejak tahun 2015 memberikan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat di Lembang Parandangan. Kondisi saat ini dapat dikatakan lebih baik daripada yang lalu, sebab pemerintah lembang memang memprioritaskan penggunaan dana bagi pembangunan atau perbaikan jalan.

Masyarakat lembang saat ini, merasa gembira setelah banyak perbaikan maupun pembangunan jalan yang di rabat beton. Hal ini karena akses terhadap jalan sudah dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat di Lembang Parandangan. Kemudahan akses ini kemudian juga berdampak terhadap efisiensi waktu masyarakat lembang dalam kegiatannya sehari-hari. Secara tidak langsung, akses jalan yang sudah baik di hampir seluruh wilayah di Lembang Parandangan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi beberapa orang masyarakat yang memiliki kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Lapangan pekerjaan baru yang tercipta yaitu layanan angkutan antar

jemput penumpang dari depan rumah, layanan penitipan kebutuhan sehari-hari dari pusat kota hingga jasa pengantaran babi menggunakan mobil maupun motor. Jenis lapangan pekerjaan baru yang tercipta ini juga tidak banyak menyerap tenaga kerja baru, sehingga masalah pengangguran dan kemiskinan di Lembang Parandangan tetap saja tidak teratasi.

Sesuai dengan definisi *outcome* menurut (Foundation, 2004) bahwa kemanfaatan dari *outcome* dapat dirasakan dalam jangka pendek (1-3 tahun) dan jangka waktu yang panjang (4-6 tahun). Model analisis *outcome* yang digunakan yaitu dengan model program *results story* oleh Penna & Phillips, 2005. Model ini dipilih karena sesuai dengan konteks kebutuhan, yaitu untuk mencari jawaban mengenai *outcome* yang dirasakan masyarakat lembang dari program kegiatan yang telah direalisasikan dengan menggunakan dana desa sejak tahun 2015-2019 di Lembang Parandangan maka uraian *outcome* pemanfaatan dana lembang di Lembang Parandangan terbagi atas dua jangka waktu, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. *Outcome* Hasil Pemanfaatan Dana Lembang Tahun 2015-2019

No.	Jangka Waktu	Outcome	Keterangan
1.	Pendek (Short-Term)	Penambahan Pendapatan Masyarakat	- Pelaksanaan program dana desa dengan pola swakelola memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat di lembang tanpa batasan gender untuk turut andil dalam pembangunan. Program ini iprioritaskan untuk masyarakat kelas menengah kebawah, pengangguran dan setengah pengangguran.

- Semua pekerja yang turut andil dalam program pembangunan akan diberi upah.
- Upah akan diberikan setelah pekerjaan telah rampung dan upah yang didapat oleh para pekerja bervariasi, tidak seragam karena berdasarkan pada anggaran pengerjaan tiap jalan serta beban kerja dari setiap pekerja yang terlibat.
- Oleh karenanya, akan ada sumber pendapatan bagi masyarakat, namun tidak terus-menerus melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu saja yaitu saat ada program pengerjaan saja.

Pemenuhan Kebutuhan Harian	- Upah yang didapatkan oleh masyarakat, umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan harian mereka maupun keluarganya, seperti untuk membeli beras, gula serta kebutuhan harian lainnya. Selain itu, para pekerja yang masih remaja biasanya memanfaatkan upah yang didaptnya untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka, seperti membeli buku.
Peningkatan Akses	- Hampir semua wilayah di lembang sudah dapat dijangkau karena sebagian besar jalan telah di rabat beton. Oleh karenanya, akses terhadap jalan sudah dirasakan sama oleh semua masyarakat di lembang
	- Masyarakat tidak perlu lagi bersusah payah untuk berjalan kaki dalam melakukan kegiatan mereka setiap hari (bekerja, bersekolah, mengangkut hasil tani, dan lain sebagainya).
	- Jalan-jalan sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda dua hingga roda empat. Bahkan saat ini, kendaraan sudah bisa sampai kedepan rumah masyarakat.
	- Kemudahan akses berdampak terhadap efektifitas keseharian waktu masyarakat.

			- Biaya yang dikeluarkan masyarakat bisa semakin ditekan apabila hendak melaksanakan upacara adat seperti rambu solo' maupun rambu tuka'.
2.	Panjang (Long- Term)	Tercipta Lapangan Pekerjaan Baru	- Adanya jalan-jalan tani yang baru dibangun, dalam waktu lima tahun terakhir ini nyatanya dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat maupun roda dua - Lapangan pekerjaan baru yang tercipta yaitu layanan angkutan antar jemput penumpang dari depan rumah, layanan penitipan kebutuhan harian dari pusat kota hingga jasa pengantaran babi. - Oleh karenanya, masyarakat yang memiliki kendaraan memiliki sumber pendapatan yang tetap setiap harinya, karena peminat akan jasa ini sangat tinggi.

6. Tata Kelola Pemanfaatan Dana Desa yang Belum Optimal, diabstraksi dari tema peranan pemerintah dan lembaga kemasyarakatan lembang serta konsep pembangunan lembang. Apresiasi terhadap pemerintahan lembang periode 2014-2019 disampaikan oleh semua informan maupun masyarakat saat diwawancarai. Apresiasi ini merupakan wujud kepuasan masyarakat, kendati merasa puas akan kondisi jalan yang sudah baik, tetapi masih ada juga yang meragukan, mempertanyakan hingga menyimpan kecurigaan terhadap pemerintahan lembang yang lalu. Indikasi bahwa pemerintahan lembang belum sepenuhnya menerapkan *good*

governance berdasarkan hasil olahan data lapangan, yaitu :

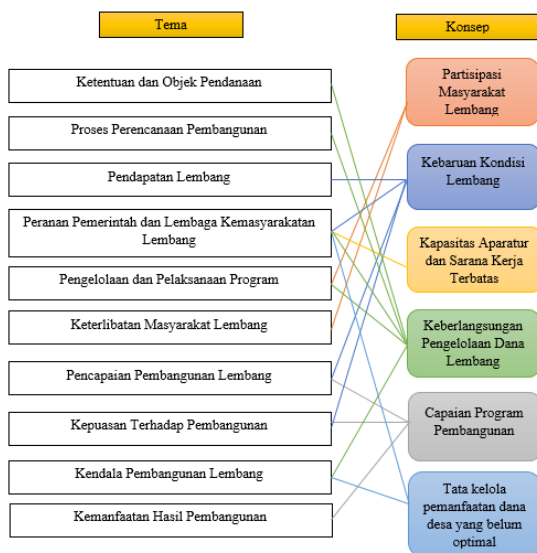
- Perangkat lembang mulai dari sekretaris, bendahara, kaur-kaur hingga tiga kepala dusun yang membantu kepala lembang, tidak dapat dipungkiri adalah diangkat karena sifatnya preferensial
- Adanya informasi yang bertolak belakang disampaikan oleh pemerintah lembang dengan masyarakat lembang berkaitan dengan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan
- Berkaitan dengan pengelolaan dana lembang, kepala Badan Permasyarakatan Lembang (BPL) mencurigai adanya penyalahgunaan dana. Hal ini mendasar karena ketidakterbukaan kepala lembang terkait laporan realisasi penyerapan dana lembang dan kecurigaan ini tidak akan muncul apabila kepala lembang terbuka atas laporan yang ada
- Kecurigaan ini makin diperparah dengan ketidaksesuaian fungsi perangkat lembang dengan yang semestinya

Selain itu, bagi BPL sendiri, ada ketidakpastian hukum saat ini yang seharusnya menjadi dasar dalam menjalankan tugasnya mengawasi kinerja kepala lembang, terutama berkaitan dengan pengelolaan dana lembang. Peranan BPL dalam pengawasan terhadap kinerja kepala lembang dalam UU Desa tidak sekuat dulu, yaitu dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, karena pertanggungjawaban anggaran kepala desa bukan lagi kepada BPL, melainkan

langsung disampaikan kepada daerah melalui camat. Adanya ketidakpastian hukum inilah yang kemudian membuat BPL tidak dapat bekerja secara baik dalam menjalankan tanggung jawabnya mengawasi kinerja pemerintahan di lembang.

Ada tiga dimensi dari *good governance* yang jelas belum diterapkan oleh pemerintahan Lembang Parandangan periode 2014-2019 selama masa pemerintahannya berdasarkan uraian temuan di atas, yaitu akuntabilitas dan transparansi yang kurang, berkaitan dengan laporan realisasi penyerapan dana lembang terhadap BPL dan masyarakat serta partisipasi yang preferensial selama pelaksanaan program pembangunan yang didanai dana lembang.

Gambar berikut, merupakan gambaran keterkaitan dalam bentuk *mapping* dari setiap tema yang mendukung konsep-konsep hasil induksi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 4. Matriks Induksi Konsep
(Sumber : Hasil Analisis, 2020)

Dari uraian keenam konsep yang dihasilkan dalam penelitian ini, konsep keberlangsungan pelaksanaan dan pengelolaan dana lembang merupakan konsep yang melatarbelakangi kelima konsep yang lainnya dari sudut pandang peneliti.



Gambar 5. Hubungan Interelasi Antar Konsep
(Sumber : Hasil Analisis, 2020)

Model hubungan interelasi antar konsep utama dengan konsep lainnya dalam penelitian ini, yaitu seperti pada Gambar 5. diatas. **Hub. konsep 1 dengan konsep 2 yaitu,** adanya keberlangsung pelaksanaan dan pengelolaan dana lembang yang mana pengadaan barang dan jasa di lembang yang didanai dana lembang menerapkan pola swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tingkat partisipasi masyarakat meningkat dalam pembangunan. Hal ini terlihat dari jumlah serta keterlibatan berbagai unsur masyarakat tanpa batasan gender maupun usia.

Hub. konsep 1 dengan konsep 3 yaitu, yaitu adanya adanya keberlangsungan pengelolaan dana lembang yang mana pengadaan barang dan jasa di lembang yang

didanai dana lembang menerapkan pola swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tingkat partisipasi masyarakat meningkat dalam pembangunan. Hal ini terlihat dari jumlah serta keterlibatan berbagai unsur masyarakat tanpa batasan gender maupun usia. Prinsip partisipasi dalam *good governance* telah diterapkan oleh pemerintah lembang.

Hub. konsep 1 dengan konsep 4 yaitu, konsep keberlangsungan pengelolaan dana lembang sangat berkaitan dengan kapasitas aparatur dan sarana kerja yang terbatas. Poin terbatas ini merupakan sebuah realitas yang tentunya bertolak belakang dari yang seharusnya yaitu yang memadai. Adanya ketidaksesuaian tugas yang dijalankan oleh perangkat lembang maupun Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) karena berbagai macam faktor mulai dari keterbatasan pendidikan sehingga kemampuan tidak mumpuni hingga ketidakpastian hukum saat ini.

Hub. konsep 1 dengan konsep 5 yaitu, indikasi bahwa adanya praktik tata kelola pemerintahan tidak baik pada masa pemerintahan Kepala Lembang Parandangan periode 2014-2019 selama keberlangsungan pengelolaan dana lembang didasarkan pada temuan di lapangan. Ada tiga dimensi dalam *good governance* yang secara nyata belum diterapkan oleh kepala lembang, yaitu akuntabilitas dan transparansi yang kurang berkaitan dengan laporan realisasi penyerapan dana lembang terhadap BPL dan masyarakat serta partisipasi yang preferensial selama pelaksanaan program pembangunan yang didanai dana lembang. Hal inilah yang kemudian menimbulkan munculnya rasa ketidakpercayaan dan kecurigaan dari BPL

hingga masyarakat lembang terhadap pemerintahan yang sedang berjalan saat itu. Selain itu, bagi BPL sendiri, ada ketidakpastian hukum saat ini karena tugasnya mengawasi kinerja kepala lembang dalam UU Desa tidak sekuat dulu, yaitu dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, karena pertanggungjawaban anggaran kepala desa bukan lagi kepada BPL, melainkan langsung disampaikan kepada daerah melalui camat. Ketidakpastian hukum inilah yang kemudian membuat BPL tidak dapat bekerja secara baik selama periode pemerintahan lembang lalu.

Hub. konsep 1 dengan konsep 6 yaitu, adanya keberlangsungan pengelolaan dana lembang mempengaruhi kondisi di lembang. Perbedaan wajah Lembang Parandangan dahulu dan sekarang dapat dilihat secara nyata melalui kenampakan fisiknya. Kendati Lembang Parandangan memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) tertinggi di Kecamatan Buntu Pepasan dibandingkan lembang-lembang lainnya karena ketersediaan fasilitas pelayanan dasar yang cukup lengkap, namun nyatanya dari segi infrastruktur jalan sendiri masih memprihatinkan. Keadaan ini kemudian perlahan-lahan mulai teratasi melalui pelaksanaan program yang didanai dana desa, sehingga dapat dilihat kebaruan kondisi lembang, dahulu dan sekarang.

KESIMPULAN

Pemanfaatan dana lembang di Lembang Parandangan sejak tahun 2015-2019 telah memperhatikan dengan problematika lembang serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya, namun apabila berdasarkan pada ketentuan yang berlaku,

penggunaan dana lembang ini, belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas penggunaan dana lembang yang tercantum dalam Permendesa. Selama lima tahun pertama, fokus pemerintah lembang yaitu peningkatan infrastruktur, utamanya rabat beton jalan di banyak titik di wilayah lembang. Selain itu, program yang terealisasi lainnya adalah penataan jalan, pentaludan jembatan hingga pemugaran TK Banne La'bi'.

Konsep pengelolaan dana lembang di Lembang Parandangan yang berhasil diinduksimeliputi konsep partisipasi masyarakat, konsep kapasitas aparatur dan sarana kerja terbatas, konsep keberlangsungan pengelolaan dana lembang, konsep kebaruan kondisi lembang, konsep capaian program pembangunan, dan konsep tata kelola pemanfaatan dana desa yang belum optimal. Adapun konsep keberlangsungan pengelolaan dana lembang menjadi konsep penting yang melatarbelakangi kelima konsep lainnya.

SARAN

1. Fungsi pengawasan dalam pengelolaan dana lembang perlu ditingkatkan terlebih dari sisi Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) serta masyarakat lembang. Pemerintah pusat sebagai pemegang kebijakan seharusnya menelaah kembali peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaporan pertanggungjawaban penyerapan anggaran dana lembang oleh kepala lembang karena membuat BPL sebagai mitra kerja yang mengawasi kinerja kepala lembang semakin tidak berdaya. Sudah seharusnya, BPL maupun masyarakat memiliki fungsi pengawasan

penuh terhadap pengelolaan dana lembang oleh pemerintah lembang, khususnya kepala lembang.

2. Fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana lembang oleh pemerintah pusat maupun daerah seharusnya bukan hanya sekedar berdasarkan laporan penyerapan anggaran saja namun harus dilakukan secara menyeluruh.
3. Pengembangan potensi kekayaan SDA maupun SDM lembang perlu dilakukan melalui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang didanai dana lembang seperti pembentukan BUMLem maupun pelatihan-pelatihan keterampilan bagi kelompok-kelompok masyarakat. Harapannya agar dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat lembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Basah, H. (2009). *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa untuk Mengatasi Kemiskinan*. Direktorat Permukiman Dan Perumahan
- BPS Sulawesi Selatan. (2018). *Indeks Pembangunan Desa (IPD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018*
- Cahyono, H., Aziz, N. L. L., Nurhasim, M., Rahman, A. R., & Zuhro, R. S. (2020). *Pengelolaan Dana Desa : Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintah Desa*. LIPI Press
- Foundation, W. . K. (2004). *Logic Model Development Guide: Using Logic Models to Bring Together Planning, Evaluation, and Action*. Logic Model Development Guide, 72
- Hernowo, Basah. (2004). *Kajian*

Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan. Artikel Jurnal, Vol. 1, No. 1

Jamal, E. (2017). *Membangun Momentum Baru Pembangunan Pedesaan Di Indonesia*. 28(1), 7–14

Karidewi, M. P. (2010). *Kajian Eksistensi Kearifan Lokal Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Tenganan Kecamatan Karangasem Provinsi Bali*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*

Muslihah, S., Siregar, H. O., & Sriniyati. (2019). *Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 7 No. 1, J(1), 85–93

Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya

Penna, R., & Phillips, W. (2005). *The Evaluation Exchange : A Periodical On Emerging Strategies im Evaluating Child And Family Services, Part Eight Outcome Models*. Harvard Family Research Project: The Evaluation Exchange, XI(2), 1–20

Saraswati, Y. (2019). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. Universitas Gadjah Mada*

86news. (2019). *Terkait Dana Desa ini,*

husus di Dua Kabupaten di Toraja, Kemendes Gandeng KPK Mengawasi Dana Desa. 86news. Diakses oleh Bergita Gusti Lipu (5/5/2020) melalui <https://86news.co/2019/06/06/terkait-dana-desa-ini-khusus-di-dua-kabupaten-di-toraja-kemendes-gandeng-kpk-mengawasi-dana-desa/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.